

Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja	No	Proses Bisnis	Risiko	Penyebab Risiko	Rencana Penganggaran/ Deskripsi RTP	Kategori Risiko	Dampak	Penanganan Yang Sudah Ada	Sisa Risiko	Rencana Penanganan	Rencana Tanggal	Skala Kemungkinan Inherent	Skala Dampak Inherent	Output
Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPASP	Terjadinya Benturan Kepentingan terkait Proses Penetapan KUA-PPAS dan Perubahan KUPA/PPASP	1 Tidak adanya Kesesuaian Anggaran antara RKPD dan KUA-PPAS/ KUPA/PPASP 2 Masih adanya kepentingan dalam penyusunan KUA-PPAS/ KUPA/PPASP	1 pemberitahuan melalui medos 2 Adanya Review KUA/PPAS 3 Memperbarui SSH dan SBU yang disesuaikan dengan kenaikan harga pasar setiap tahunnya	Kepatuhan	Adanya penundaan dan pemotongan Dana Transfer	1 Surat Edaran 2 Pemberitahuan secara lisan	Terjadinya benturan kepentingan terkait proses penetapan KUA-PPAS/ KUPA-PPASP	1 pemberitahuan melalui medos 2 Adanya Review KUA-PPAS/ KUPA-PPASP	Mulai : 01 Agt 2024 Selesai : 08 Agt 2024	2	4	Jumlah Buku Nota Kesepakatan KUA-PPAS/ KUPA-PPASP
		2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD dan Perubahan RKA - SKPD	Terjadinya Benturan Kepentingan terkait Proses Verifikasi RKA-SKPD dan Perubahan RKA - SKPD	1 Terjadinya kesalahan penganggaran kode rekening pendapatan dan belanja pada Perangkat Daerah 2 SDM yang kurang berkompeten	Surat Edaran	Kepatuhan	Tidak bisa melakukan Pencairan	1 Surat Edaran 2 Melakukan desk Verifikasi penyusunan RKA dan Perubahan RKA	Terjadinya kendala pada saat pencairan kegiatan	Surat Edaran	Mulai : 09 Agt 2025 Selesai : 23 Agt 2025	2	3	Jumlah RKA dan Perubahan RKA yang diverifikasi
		3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/ Perubahan APBD	Penetapan Perda APBD dan Pergub APBD dan Perubahan APBD yang tidak tepat waktu	1 Terjadinya kesalahan perhitungan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD Perubahan APBD 2 SDM yang kurang berkompeten	Melakukan FGD terkait penyusunan RKAdan RKAP OPD	Strategi PEMDA	1 Terkena sanksi dari pusat terhadap pendanaan DAU, DAK dan Dana Transfer 2 Terjadinya Pengelembungan Dana (Mark Up) Anggaran	1 Evaluasi RKAP OPD 2 Koordinasi dengan OPD dalam rangka penyusunan RKA	Penyusunan RKAP masih ada yang belum sesuai dengan Standar BiayaUmum (SBU dan SSH)	Melakukan FOD terkait penyusunan RKA OPD	Mulai : 16 Agt 2024 Selesai : 16 Sep 2024	2	4	Jumlah Perda / Perubahan Perda dan Pergub/ Perubahan Pergub Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD dan APBD-P
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/ Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Proses Penganggaran Kabupaten/Kota yang Tertunda	OPD Kabupaten/Kota terlambat menyerahkan Perubahan RAPBD	1 Pembahasan Penyusunan Anggaran dengan Kabupaten/Kota 2 Melakukan FGD terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Operasional	Mengganggu tercapainya tujuan organisasi	Membuat surat Teguran tentang Penyampaian Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Perda dan Pergub APBD Kabupaten/Kota tidak disahkan	1 Pembahasan Penyusunan Anggaran dengan Kabupaten/Kota 2 Melakukan FGD terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Mulai : 01 Nov 2025 Selesai : 16 Des 2025	2	4	Persentase Surat Keputusan Hasil Evaluasi Perubahan 17 Kabupaten/Kota
		5	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Kabupaten/Kota tidak tepat waktu	Terlambatnya kesepakatan antara Pemda Kabupaten/ Kota dan DPRD Kabupaten/ Kota	Monitoring dan Evaluasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota bersama Inspektorat dan pendampingan oleh BPKP	Kepatuhan	Tahapan waktu penyusunan APBDP lebih lambat	Membuat surat Teguran tentang Penyampaian Evaluasi Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/Kota	Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota tidak disahkan	Monitoring dan Evaluasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota bersama Inspektorat dan pendampingan oleh BPKP	Mulai : 01 Jul 2024 Selesai : 16 Agt 2024	2	4	Persentase Surat Keputusan Hasil Evaluasi 17 Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pengeluaran (Belanja) yang tertunda	Penerimaan tidak tepat waktu	Membuat Pergub Strategi Pengelolaan Kas Daerah	Operasional	Penundahan Pengeluaran APBD	Rekonsiliasi antara BPKAD, OPD dan Bank Sumsel yang terjadwal	Hutang	Membuat Pergub Strategi Pengelolaan Kas Daerah	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	4	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Sumatera Selatan
		7	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Belanja yang tertunda	Laporan Dak Fisik dan DAK Non Fisik yang tertunda	Laporan DAK disampaikan tepat Waktu	Operasional	Penundaan Pengeluaran Dana DAK dari Pusat	Surat Edaran Percepatan Penyerapan Anggaran, Koordinasi, Fasilitasi dan Asistensi	Kurang Salur Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan DAK disampaikan tepat waktu	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	4	Jumlah Laporan DAK FISIK dan DAK Non Fisik
		8	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kehilangan uang tunai dan terjadinya kecurangan atau Fraud	1 Keamanan transaksi secara tunai yang masih belum maksimal 2 terjadinya kecurangan atau fraud	Kartu Kredit Pemerintah Daerah	Fraud Pelaksanaan	Kerugian Daerah	Surat Edaran Percepatan Penyerapan Anggaran	Mengurangi Cost Of Fund (Idle Cash)	Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah	Mulai : 01 Des 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	4	Jumlah Transaksi Keuangan Daerah secara Digital (Non Tunai) dan Transparan
		9	Rekonsiliasi DataPenerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tidak tersalurinya Dana Transfer dari Pusat ke Pemerintah Daerah	Terlambatnya Rekonsiliasi Lapon terhadap Potongan SP2D dan Jumlah Pajak serta IWP	Penyampaian Laporan Tepat Waktu	Kepatuhan	Penundahan Penyaluran dan dari Pemerintah Daerah	Rekonsiliasi Pajak telah dilakukan	Terlambatnya penyaluran Dana Transfer dari Pusat ke Pemerintah Daerah	Penyampaian Laporan Tepat Waktu	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	4	1 Jumlah Laporan terhadap Potongan SP2D 2 Jumlah Pajak dan IWP
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	10	Konsolidasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Behan	Dokumen bukti transaksi tidak sesuai dengan Rekening Koran dari Bank	Laporan Realisasi Anggaran Tidak Sesuai dengan Bukti Setor Penerimaan dan Reking Koran	Sosialisasi kebijakan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Pendapatan	Terlambatnya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semester dan Tahunan	Tiap bulan harus melakukan rekonsiliasi pendapatan dan Belanja dengan SKPD	Masih ada penyesuaian Penginputan Bukti Setor Penerimaan dengan Rekening Koran dari Bank	Sosialisasi kebijakan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	1	2	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
		11	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengumpulan data Laporan Keuangan SKPD dan BLUD tidak Tepat Waktu dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku	PPK SKPD/BLUD belum memahami Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Standar Penyajian Laporan Keuangan	Penyampaian penjelasan verbal dan tulisan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kepatuhan	Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah menurun	Rekonsiliasi BLUD	Penyampaian penjelasan verbal dan tulisan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Penyampaian penjelasan verbal dan tulisan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Mulai : 02 Mei 2025 Selesai : 30 Sep 2025	2	4	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
		12	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Pimpinan dan Anggota DPRD tidak menerima Rancangan Perda Pertanggungjawabasn Pelaksanaan APBD	Ketidaksesuaian pendapat antara Kepala Daerah dengan DPRD terkait rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyampaian penjelasan verbal dan tulisan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kepatuhan	Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak disahkan menjadi Perda	Pengawasan Penganggaran disesuaikan dengan hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Perubahan KebijakanPelaporan Pertanggungjawaban APBD	Penyampaian penjelasan verbal dan tulisan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	1	4	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tidak Terlaksananya Bantuan Keuangan 17 Kabupaten/Kota	Terlambatnya Kabupaten/ Kota menyampaikan hasil verifikasi terhadap Bantuan Keuangan	Surat Edaran Gubernur ke Kabupaten/Kota	Strategi PEMDA	Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan ke Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan	Surat Edaran Gubernur ke Kabupaten/Kota	Mulai : 01 Nov 2024 Selesai : 28 Feb 2025	2	4	SK Bantuan Keuangan 17 Kpubatan/Kota
Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	14	Penyusunan Standar Harga	Tidak Tersedianya Satuan Standar Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	Kurangnya pengetahuan SDM tentang Satuan Standar Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU)	Penyusunan terhadap Standar Harga dan Standar Biaya	Fraud Pelaksanaan	Penganggaran yang tidak sesuai dengan Satuan Standar Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU).	Melakukan Survey Pasar untuk menetapkan Standar Satuan Harga (SSH)	Masih terdapat Item Barang yang belum tercatat dalam SSH akibat kelalaian OPD	Penyusunan terhadap Standar Harga dan Standar Belanja	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	4	Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU).
		15	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ketidak sinkronan Belanja Aset antara RKBMD dan DPA	1 Pengabaian Prosedur RKBMD dan RKPBMd Tahun Anggaran 2025	1 mengadakan sosialisasi terkait perubahan aturan dengan terbitnya	Belanja	1 Belanja tidak efektif dan efisien	SOP Pengendalian BMD Permendagri No 19 Tahun 2016 dan BMD No 9 Tahun 2020	Penyusunan RKA tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga	1 mengadakan sosialisasi terkait perubahan aturan dengan terbitnya Bermanadag nomor 9	Mulai : 01 Jan 2025			1 40 dokumen penelaahan RKBMD OPD

				2 Kurangnya kesadaran Pengguna Barang 3 Proses Pembahasan Anggaran yang Tidak Tertib	2 di lakukan pembahasan dengan mengundang seluruh PB ke luar		2 temuan auditor	2018 dan terus berlanjut hingga 2018	2018 dan terus berlanjut hingga 2018	2 di lakukan pembahasan dengan mengundang seluruh PB ke luar Provinsi Sumatera Selatan	Selesai : 31 Des 2025	4	3	2 Penetapan RKBMMD
		16	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tidak Terbitnya / diprosesnya SK Penetapan Penggunaan BMD, SK Penghapusan, SK Alih Status	Tidak ada Usulan dari OPD	1 Peningkatan Pemahaman SDM terhadap Regulasi 2 Komitmen para Pemangku Jabatan	1 Berpengaruh pada WTP 2 Data BMD tidak iakui kewajarannya	Surat Edaran keseluruhan OPD	Data BMD tidak atau kurang di yakini antara Fisik dan Pencatatan	1 Peningkatan Pemahaman SDM terhadap Regulasi 2 Komitmen para Pemangku Jabatan	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	3	Jumlah SK Penetapan Status, Alih Status dan Penghapusan
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Tanah yang tidak mempunyai Sertifikat diklaim dan kurang pengamanan fisik (patok batas, papan nama dan pagar), digunakan dan diduduki oleh pihak lain yang tidak sah 2 bangunan dan kendaraan di gunakan pihak lain yang tidak berhak	1 kurangnya penganan fisik tanah dan bangunan (papan nama, patok batas dan pagar) 2 Banyak tanah yang belum bersertipikat 3 BAST penggunaan bangunan dan kendaraan tidak di perbaharui, pengarsipan kurang baik 4 kurangnya kesadaran dan pejabat/ASN yang sudah mutasi dan/atau pensiun untuk mengembalikan aset yang di gunakan semasa aktif 5 Pengamanan aset administrasi, fisik dan hukum belum maksimal	1 melakukan sosialisasi pengamanan aset 2 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan aset di OPD	1 Banyak Terjadi Klaim Masyarakat atas Lahan yang Telah diganti Rugi/ dibebaskan 2 Kehilangan Aset Daerah 3 Bermasalah dengan Hukum	1 pencatatan aset yang akurat 2 melakukan pemasangan Patok batas tanah, pagar dan papan nama 3 agar Pengguna barang melakukan sertipikasi tanah dalam penguasaannya 4 melakukan dokumentasi BAST penggunaan bangunan dan kendaraan dengan tertib 5 melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengamanan aset	kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	1 melakukan sosialisasi pengamanan aset 2 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan aset di OPD	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	3	3	1 Laporan penertiban aset bermasalah 2 laporan sertipikasi tanah
		18	Penilaian Barang Milik Daerah	Neraca pemerintah daerah tidak akurat, tidak dapat menyajikan nilai wajar atas barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1 Ketergantungan Pemprov. Sumsel dengan Penilai Pemerintah (DJKN) dan Penilai Publik 2 Tidak adanya fungsional penilai di Pemprov. Sumsel dan kurangnya SDM yang bersertifikasi	Peningkatan Kapasitas SDM	1 nilai aset pada laporan keuangan tidak mencerminkan nilai sebenarnya 2 Tidak terlaksananya proses pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD	Regulasi	Neraca pemerintah daerah tidak menggambarkan real dan pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan tidak dapat dilaksanakan sehingga potensi PAD hilang	Peningkatan Kapasitas SDM	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	2	1 Jumlah BMD bernilai Rp0,00 dinilai 2 Jumlah BMD yang dikerjakan dinilai 3 Jumlah BMD yang dipindahtanganan dinilai
		19	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD tidak sesuai aturan	1 Kurangnya pemahaman TB/KPB dalam pengelolaan BMD yang baik 2 Kurangnya kesadaran mitra pemanfaatan dalam hal melaksanakan kewajiban	Melakukan FGD terkait pengelolaan BMD	1 pencatatan yang tidak akurat 1 administrasi pengelolaan BMD tidak tertib (KIR, Label Barang) adminsitrasi penggunaan aset oleh Pejabat dan/atau PNS belum tertib Pemanfaatan aset oleh pihak lain belum tertib	1 memperbanyak pengembangan kompetensi SDM 2 pengelolaan BMD Pengawasan dan investigasi BMD	1 masih banyak tanah yang belum bersertipikat 2 masih banyak pencatatan bangunan belum akurat 3 masih terdapat administrasi penggunaan belum maksimal 4 masih terdapat pemanfaatan aset belum sesuai aturan	Melakukan FGD terkait pengelolaan BMD	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	3	1 Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan BMD 2 Jumlah Laporan Pengawasan BMD yang dilakukan Kontrak Pemanfaatan rekomendasi hasil Pengawasan
		20	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemasnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Ketidak patuhan dan tidak optimalnya dalam penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemasnahan dan Penghapusan BMD	Kesepakatan pihak kedua/mitra atas pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemasnahan BMD	1 Peningkatan pemahaman SDM terhadap terhadap regulasi 2 Komitmen para pemangku kekuasaan	Tidak adanya penambahan PAD dan BMD tidak optimal	Regulasi	Tidak tercapainya pengelolaan BMD dengan baik	1 Peningkatan pemahaman SDM terhadap terhadap regulasi 2 Komitmen para pemangku kekuasaan	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	3	1 Jumlah Perjanjian sewa 2 Jumlah perjanjian Hibah 3 Jumlah Berita Acara serah terima
		21	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Adanya Kendala dalam menyusun laporan BMD dan Laporan Keuangan	Terjadinya kesalahan dalam pemilihan Kodevikasi jenis barang	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan OPD telah dilakukan setiap bulan	Berpengaruh dalam opini BPK	Rekonsiliasi Akuntansi, Aset dan Pelaporan telah dilakukan setiap Bulan	Laporan Barang Milik Daerah yang di sajikan masih terdapat koreksi dari Auditor (BPK)	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan OPD telah dilakukan setiap Bulan	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	1	3	Berita Acara Rekonsiliasi
		22	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tidak sinkronnya Laporan BMD dan Laporan Keuangan	Kapasitas dan kompetensi penyusun laporan barang milik daerah di OPD yang belum memadai	Ketapan pencatatan yang akurat sesuai regulasi yang berlaku	Belanja	Menurunnya opini laporan keuangan dari BPK	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan OPD telah dilakukan setiap bulan	Ketepatan pencatatan yang akurat sesuai regulasi yang berlaku	Mulai : 01 Jan 2025 Selesai : 31 Des 2025	2	3	Laporan BMD